

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa pengaruh dari Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, serta adanya analisis variabel interaksi (PAD×DAU) kepada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung $4,7669 > 1,9750$ dan probabilitas $0,0000 (< 0,05)$. Hal ini karena kuantitas demografi menentukan besarnya penyediaan fasilitas publik dan pelayanan dasar yang harus dibiayai, sehingga semakin padat jumlah penduduk, Belanja Daerah akan semakin meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung $-3,6897$ (nilai absolut $-3,6897 > 1,9750$) dan probabilitas $0,0003 (< 0,05)$. Hal ini karena peningkatan alokasi belanja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara belum ditopang secara optimal oleh kemampuan pendapatan lokalnya sendiri, melainkan lebih dipengaruhi oleh fluktuasi pos pengeluaran non-belanja atau alokasi dana cadangan.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung $0,0779 < 1,9750$ dan probabilitas $0,9380 (> 0,05)$. Hal ini karena alokasi transfer dana dari pemerintah pusat berupa DAU belum menjadi pendorong atau stimulus utama yang secara mandiri menentukan besaran kebijakan pengeluaran di daerah tersebut..
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung $-1,0792 < 1,9750$ dan probabilitas $0,2821 (> 0,05)$. Hal ini karena variasi tinggi atau rendahnya output ekonomi per kapita serta tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat belum menjadi acuan utama dalam menentukan volume kebijakan belanja daerah di tingkat kabupaten/kota.

5. Variabel Interaksi (PAD×DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, dengan nilai t-hitung $3,9036 > 1,9750$ dan probabilitas $0,0001 (< 0,05)$. Hal ini karena DAU secara nyata bertindak sebagai variabel pemoderasi (*moderating*) yang memperkuat hubungan PAD dalam memengaruhi Belanja Daerah. Temuan ini sekaligus membuktikan tidak terjadi fenomena *flypaper effect*, karena belanja daerah direspons lebih kuat oleh kemampuan PAD yang didukung dana transfer, bukan karena ketergantungan transfer yang memicu perilaku boros.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian yang telah diselesaikan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Akademis

- a. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena *flypaper effect*, disarankan untuk tidak hanya terpaku pada variabel interaksi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian komparasi koefisien antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan alat uji statistik yang lebih spesifik, seperti Uji Wald (*Wald Test*). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yang lebih kuat dan presisi mengenai apakah respon belanja pemerintah daerah memang lebih terstimulasi oleh dana transfer (DAU) dibandingkan dengan pendapatan mandiri (PAD).
- b. Bagi pengamat selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup pengujian *flypaper effect* dengan memisahkan dan membandingkan variabel penerimaan pajak provinsi (seperti Dana Bagi Hasil Pajak) dengan pajak kabupaten/kota. Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan untuk membuktikan apakah perilaku pemborosan belanja daerah (*flypaper effect*) tidak hanya dipicu oleh transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga terjadi pada skema transfer keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
- c. Bagi pengamat selanjutnya, diharapkan dapat menjangkau lebih luas terkait model penelitian dengan menambahkan atau mengembangkan variabel-

variabel bebas lainnya yang belum dimasukkan dalam kajian ini namun diduga kuat memiliki pengaruh terhadap pengeluaran daerah. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan antara lain , Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dana Bagi Hasil, Ketimpangan Penduduk, Inflasi, ataupun indikator ekonomi makro lainnya, serta menerapkan variasi model interaksi yang lebih beragam untuk menguji perilaku belanja daerah.

- d. Mengingat ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, pegamat selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah pengamatan. Penelitian ke depan dapat dilakukan dengan melakukan komparasi antar-provinsi di tingkat nasional maupun pada lingkup regional yang lebih luas agar diperoleh kesimpulan model yang lebih menyeluruh.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil temuan bahwa tidak terjadi fenomena ketergantungan dana transfer yang memicu pemborosan anggaran, pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dinilai sudah cukup bijak dalam merespon bantuan dana pusat bersama pendapatan lokalnya. Namun, adanya dampak negatif dari Pendapatan Asli Daerah secara mandiri mengindikasikan bahwa struktur kemandirian keuangan lokal masih perlu ditingkatkan, terutama untuk wilayah-wilayah di luar pusat perekonomian utama.

Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk lebih mengoptimalkan alokasi anggaran belanja produktif atau belanja modal yang mampu memberikan dampak pengganda bagi perekonomian lokal dalam jangka panjang. Langkah ini perlu dibarengi dengan pemetaan kembali potensi keunggulan sektor-sektor andalan di tiap-tiap daerah, sehingga dapat mendorong geliat usaha masyarakat yang pada akhirnya mampu memperluas basis penerimaan sumber pendapatan asli daerah secara mandiri dan berkelanjutan.